KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Kurangi bahan baku impor, komisi IX minta jaga kestabilan harga obat
Tanggal : Sabtu, 06 Juni 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Kurangi Bahan Baku Impor

Komisi IX Minta Jaga Kestabilan Harga Obat

ANGGOTA Komisi IX DPR Vita Ervina menyoroti potensi kenaikan harga obat akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Ketahanan farmasi nasional masih menghadapi tantangan besar karena tingginya ketergantungan terhadap impor bahan baku obat dari luar negeri itu.

Vita menegaskan, sebagian besar bahan baku obat masih berasal dari luar negeri. Hal ini membuat industri farmasi Indonesia rentan terhadap tekanan ekonomi global yang berdampak bagi masyarakat.

Kondisi ini, kata dia, harus jadi alarm bagi Pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ketahanan farmasi nasional. Indonesia tidak boleh terus bergantung pada impor.

"Pemerintah wajib menjamin akses terhadap obat yang aman, bermutu, dan terjangkau," tegasnya, Kamis (4/6/2026).

Potensi kenaikan harga obat, sambung Vita, harus diantisipasi serius, karena bisa menambah beban masyarakat. Hak dasar masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas harus dijamin sepenuhnya. Terlebih dalam situasi ekonomi yang sedang mengalami banyak tantangan.

Untuk itu, dia mendorong Pemerintah melakukan diversifikasi pemasok bahan baku dan mempercepat pembangunan industri bahan baku farmasi dalam negeri. "Itu harus didukung penguatan riset, insentif investasi, peningkatan kapasitas produksi, serta kolaborasi kuat antara Pemerintah, BUMN, dan industri," katanya.

Selanjutnya, Pemerintah juga perlu memastikan pelemahan rupiah tidak mengganggu ketersediaan dan keterjangkauan obat dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang jadi tumpuan jutaan rakyat Indonesia. Pihaknya akan terus mendorong kebijakan yang mampu menjaga stabilitas harga obat secara maksimal.

Langkah ini juga sekaligus untuk mempercepat terwujudnya kemandirian farmasi nasional sebagai bagian dari ketahanan kesehatan bangsa. Kesehatan rakyat jangan sampai jadi korban ketergantungan impor bahan baku obat. "Negara harus segera mempercepat kemandirian agar akses terhadap obat yang aman dan terjangkau tetap terjamin secara berkelanjutan," ucapnya.

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher menambahkan, dalam situasi ini Pemerintah harus memastikan ketersediaan dan keterjangkauan obat bagi masyarakat. Jangan sampai masyarakat, terutama pasien yang bergantung pada obat rutin, jadi pihak yang terdampak akibat gejolak ekonomi maupun konflik global.

Karena jika demikian, itu menunjukkan ketahanan farmasi nasional menghadapi tantangan serius. Situasi saat ini harusnya dijadikan alarm untuk mempercepat kemandirian farmasi nasional. "Ketergantungan yang terlalu besar terhadap bahan baku impor membuat sistem kesehatan nasional rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dan gangguan rantai pasok," katanya.

Netty mengapresiasi langkah BPOM dan Pemerintah yang menyiapkan berbagai strategi mitigasi. Mulai dari diversifikasi pemasok bahan baku hingga penguatan pengawasan. Seluruh kebijakan itu harus bermuara pada perlindungan masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan yang menjadi hak dasar rakyat yang harus dilindungi negara.

Selanjutnya, dia mendorong Pemerintah untuk memperkuat produksi bahan baku obat dalam negeri melalui dukungan riset, insentif industri, dan kolaborasi lintas kementerian. Ketahanan kesehatan tidak cukup dengan memiliki rumah sakit dan tenaga kesehatan baik, tapi juga harus memiliki kemandirian dalam penyediaan obat-obatan strategis secara nasional.

Dia meminta Pemerintah melakukan pemantauan berkala terhadap harga obat di lapangan agar tidak terjadi lonjakan harga. Setiap penyesuaian harga harus dilakukan secara terukur dan proporsional. Akses masyarakat terhadap obat-obatan esensial tidak boleh terganggu oleh dinamika ekonomi global yang sedang berlangsung.

Kesehatan, lanjutnya, merupakan kebutuhan dasar yang harus dilindungi negara dalam situasi apa pun. Negara harus hadir memastikan masyarakat tetap mendapatkan obat yang aman, tersedia, dan terjangkau. "Jangan sampai kondisi global mengurangi hak rakyat memperoleh layanan kesehatan yang layak dan terjangkau," ingatnya.

Sebelumnya, Kepala BPOM Taruna Ikrar berbicara soal potensi kenaikan harga obat-obatan di Indonesia, menyusul nilai tukar rupiah yang melemah dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini terjadi karena masih ada banyak bahan obat yang diimpor dari luar negeri sehingga industri harus melakukan penyesuaian harga.

Demi mengatasi kenaikan harga obat, pihaknya akan melakukan beberapa langkah strategis seperti penyesuaian kemasan hingga mencari pemasok bahan baku dari negara lain dengan harga terjangkau. Lewat berbagai kebijakan itu, diharapkan harga obat dalam negeri bisa jadi lebih stabil dan tetap terjaga bagi masyarakat. ■ PYB